



## Pemulihan Transformatif atas Trauma “Sejarah Pembungkaman” bagi Masyarakat NTT dalam Paradigma Teologi Pembebasan

Liza Astuti Letde<sup>1)\*</sup>

<sup>1)</sup> Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, Indonesia

<sup>\*)</sup> Email: [lizaastuti86@gmail.com](mailto:lizaastuti86@gmail.com)

Diterima: 09 Mei 2024

Direvisi: 18 Sep. 2024

Disetujui: 23 Sept. 2024

### Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi konteks Nusa Tenggara Timur (NTT), dan masyarakat belum secara lantang menyuarakan hak-hak mereka di ruang publik. Suara-suara kritis dari penelitian-penelitian akademis belum secara signifikan membentuk daya kritis masyarakat untuk melawan ketidakadilan. Artikel ini memberi fokus dan mengkaji tentang sejarah dan solusi dari masalah kebungkaman masyarakat NTT. Artikel ini memakai lensa trauma untuk mendeteksi kebungkaman dari sejarah kekerasan massal tahun 1965. Sejarah tersebut dipahami sebagai akar trauma politik lintas generasi, yang membatasi suara di ruang publik. Setelah memahami sejarah trauma politik, artikel ini memakai analisis struktural teologi pembebasan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan mengelola kajian literatur dan menyajikan secara teroretis. Penelitian ini berupaya mengelaborasi sisi pragmatis dari teologi trauma dan teologi pembebasan untuk memahami masalah kebungkaman secara lebih komprehensif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa masalah kebungkaman mengakar pada unsur traumatis dan solusinya mesti bersifat menggugat tatanan sosial-politik. Hal ini karena pengabaian kebijakan politik terhadap pembangunan manusia yang mengakibatkan masyarakat semakin dibungkam. Dengan demikian, artikel ini menawarkan solidaritas dan pendidikan kritis dari teologi pembebasan untuk melawan kebungkaman. Tawaran tersebut dijalankan dalam konsep dialog kritis sebagai solusi pemulihan transformatif untuk menghentikan kebungkaman. Dalam hal ini, dialog kritis menjadi bagian dari tahapan adaptasi transformatif masyarakat yang trauma dan miskin.

**Kata-Kata Kunci:** Dialog Kritis; Kebungkaman; Masyarakat NTT; Pemulihan Transformatif; Teologi Pembebasan; Teologi Trauma.

**Abstract**

*Poverty remains a significant challenge within the context of East Nusa Tenggara (NTT), yet the community has not spoken out loud their rights in public spaces. Critical voices from academic research have not yet significantly formed the broader community towards addressing injustice. This article focuses and delving into the historical backdrop and potential remedies for this silence within the NTT community. This article employs a trauma lens to detect this silence particularly examining the legacy of the mass violence of 1965. This history is construed as the root of cross-generational political trauma, which limits voices in public spaces. After understanding the history of political trauma, this article uses structural theological analysis. Employing a qualitative approach, this research synthesizes existing literature and presents theoretical frameworks. This research endeavours to elucidate the pragmatic dimensions of trauma theology and liberation theology, offering more comprehensive understanding of the silence phenomenon. This research concludes that the problem of silence is deeply entrenched in traumatic experiences and necessitates a challenging solution to the socio-political order. Neglectful political policies towards human development exacerbate societal silencing. This proposition is operationalized through the concept of critical dialogue, envisaged as a transformative healing process to break the cycle of silence*

**Keywords:** *Critical-dialogue; silence; NTT-community; recovery transformative; liberation-theology; trauma-theology.*

**Pendahuluan**

Selain persoalan kemiskinan yang mendapat perhatian publik, masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) juga cenderung “bungkam” terhadap ketidakadilan. Menurut penelitian I Nguh Suryawan pada *locus* NTT mengenai *Politik Kekerasan dan Pembisuan*, menunjukkan bahwa sistem sosial (terutama pendidikan) yang ada seperti mengkondisikan masyarakat untuk diam terhadap ketidakadilan.<sup>1</sup> Kebungkaman atas berbagai bentuk kebijakan publik yang mengalienasi mereka terjadi di banyak sektor, baik itu minimnya akses pendidikan, buruknya jaminan kesehatan, ketimpangan infrastruktur, dan jaminan hasil komoditi yang tidak memadai. Dengan demikian, kemiskinan dan kebungkaman

---

<sup>1</sup> I Nguh Suryawan, “Politik Kekerasan Dan Pembisuan,” *KRITIS* 25, no. 1 (October 2016): 54–70.

menjadi problem utama dalam membicarakan kondisi ketidakadilan di tengah masyarakat NTT.

Penelitian sebelumnya mengenai penyebab “budaya diam” di NTT telah memakai berbagai pendekatan. Beberapa di antaranya: *Pertama*, tim penulis Melki Beatrix Foundation,<sup>2</sup> memakai pendekatan teoritis Bourdieu untuk menunjukkan bahwa budaya diam di NTT adalah akibat dari praktik dominasi secara struktural. Mereka memakai prinsip pendidikan kritis oleh Paulo Freire untuk melawan budaya diam dengan konsep literasi. Meskipun demikian, mereka tidak melihat akibat lintas generasi dari kekerasan struktural, bahwa kekerasan di masa lalu meninggalkan ingatan panjang sekaligus mempengaruhi perubahan tatanan sosial. *Kedua*, Mery Kolimon dalam bukunya *Misi Pemberdayaan*, memakai pendekatan praksis feminis. Baginya, suara-suara kritis dibungkam dan tidak banyak orang dapat bersuara dengan lantang mengenai ketidakadilan selama masa pemerintahan Soeharto (’67-’98).<sup>3</sup> Secara umum, Kolimon menekankan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan agar tercipta keadilan. Kolimon belum memberi perhatian pada unsur atau tahapan apa yang memungkinkan potensi diri masyarakat (yang masih terbungkam) sekarang menjadi berdaya di masa yang akan datang.

Berdasarkan penelitian yang telah ada, artikel ini bersifat melanjutkan dengan perspektif yang lain. Artikel ini memberi perhatian pada peristiwa kekerasan massal tahun 65’ di masa rezim Soeharto yang dilancarkan untuk menghentikan suara-suara kritis masyarakat. Mereka yang mengkritik dianggap memberontak dan melawan kebijakan pemerintah.<sup>4</sup> Peristiwa kekerasan yang bernuansa politik tersebut dikaji dalam artikel ini sebagai penyumbang terbentuknya akar kebungkaman bagi masyarakat NTT. Dengan demikian, artikel ini memakai lensa trauma untuk memahami bagaimana peristiwa tersebut dapat menyerang kesadaran kritis dan bagaimana memulihkan trauma tersebut. Terkait pemulihan trauma 65’, penelitian Didik Cahyano dan Agustina Samosir memunculkan unsur pengakuan korban dan pelaku kekerasan 65’ sebagai tawaran pemulihan.<sup>5</sup> Pengakuan dilakukan agar terjadi pengampunan “*forgiveness*” yang didalamnya memerlukan

---

<sup>2</sup>Tim Penulis Melki Beatrix Foundation, “Melawan Budaya Diam Menuju Pendidikan NTT Yang Dialogis: Kumpulan Opini Dan Puisi” (Guepedia, 2020), 1–28.

<sup>3</sup>Mery Kolimon, *Misi Pemberdayaan; Perspektif Teologi Feminis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 184–185.

<sup>4</sup>Silvia Pristi Werdinggar, “Tragedi 1965 Di Indonesia Perspektif Kambing Hitam Rene Girard,” *Skripsi Universitas Sanata Dharma* (2015): 66.

<sup>5</sup>Didik Christian Adi Cahyano and Agustina Raplina Samosir, “Trauma Dan Rekonsiliasi: Peran Gereja Bagi Perjuangan Pemulihan Penyintas Tragedi Kekerasan Di Indonesia,” *Kurios* 9, no. 2 (2023): 478–490.

pemulihan dan pendampingan. Meskipun demikian, berhenti pada pengakuan korban dan pelaku sulit memastikan perubahan dan transformasi pikiran. Pengakuan individu secara kolektif perlu dilampaui dengan perubahan tatanan politik untuk memastikan pemulihan secara struktural lintas generasi dapat dimungkinkan.

Dengan demikian, artikel ini dikaji berdasarkan pertanyaan sebagai berikut: Mengapa masyarakat NTT cenderung diam terhadap ketidakadilan? Bagaimana cara mendengar suara mereka? Siapa yang bertanggung jawab terhadap kebungkaman mereka? Apa yang memungkinkan mereka dapat bersuara? Untuk memberi jawaban secara komprehensif, artikel ini memakai pendekatan teoritis dari teologi trauma dan teologi pembebasan. Teori trauma membantu melihat trauma politik yang membentuk identitas kolektif, dan paradigma teologi pembebasan Gutierrez menawarkan jawaban dengan melihat dimensi struktural sebagai pembentuk identitas tersebut.

Bangunan argumentasi artikel ini bertujuan untuk membongkar akar sebab kebungkaman masyarakat NTT dan menganalisis proses apa yang dapat ditempuh untuk pulih dari “kebungkaman”. Hal ini dilakukan karena dengan bersuara, mereka dapat mengklaim hak kebebasan dan kesejahteraan di ruang publik, dan ikut mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Menyadari bahwa pembungkaman ini telah lama dan bersejarah sejak peristiwa 65’, maka poin pemulihan dan pembebasan pada artikel ini menekankan ruang adaptasi transformatif bagi masyarakat (korban-penyintas).<sup>6</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, dengan metode kajian kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari sumber literatur yang menggagas terkait masalah penelitian yang diajukan. Menurut Nursapia Harahap, kualitas penelitian kualitatif dikatakan baik jika semakin mendalam, teliti dan tergalinya data yang dikelola.<sup>7</sup> Menurut Endah Ratnaningtyas, kajian deskriptif yang mendalam berdasarkan data dan teori menjadi ciri khas penelitian kualitatif, sekaligus yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penulis berupaya memperoleh wawasan mendalam dengan melakukan analisis data

---

<sup>6</sup>Dalam artikel ini, yang dimaksud dengan korban-penyintas adalah masyarakat NTT saat ini sebagai korban “trauma sekunder” *secondary trauma*. Trauma sekunder dapat terjadi karena interaksi intens dengan korban langsung atau karena dibesarkan di lingkungan sosial traumatis.

<sup>7</sup>Nursapia Harahap, “Penelitian Kualitatif” (Medan: Wal Ahri Publishing, 2020), 125.

<sup>8</sup>Endah Marendah Ratnaningtyas, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini* (2023): 4.

secara kritis berdasarkan sumber-sumber temuan yang ada yaitu buku, artikel dan laporan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dikembangkan dengan pendekatan teoritis dalam menggali landasan teologis, pengajaran teologi dan implikasi dari teologi trauma dan teologi pembebasan Gutierrez. Penulis memperjumpakan gagasan kedua teologi ini karena keduanya memberi perhatian pada kebisuan,<sup>9</sup> penderitaan, korban-pelaku, dan memerlukan pemulihan-pembebasan.

## Hasil dan Pembahasan

### *Lensa Trauma Mendeteksi Akar Kebungkaman*

Salah satu catatan sejarah kelam di Indonesia ialah kekerasan massal pada tahun 1965-66' di masa pemerintahan Soeharto. Kekerasan massal ini diberlakukan di seluruh Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pihak yang dianggap berafiliasi dengannya. Jumlah korban di Indonesia yang diterima pada umumnya mencapai lima ribu sampai satu juta orang.<sup>10</sup> Narasi utama mengenai peristiwa ini adalah tuduhan terhadap PKI sebagai pemberontak, pengkhianat dan pemecah persatuan bangsa. Kekerasan ini dinarasikan sebagai tindakan bela negara, sehingga para korban dianggap sebagai orang-orang yang layak dihukum. Dengan demikian, rakyat yang tidak bersalah sekalipun menjadi korban kudeta politik dan diadili tanpa kejelasan hukum. Suara masyarakat sipil yang menjadi korban-penyintas kekerasan tersebut bahkan tidak dianggap penting untuk didengar.

NTT adalah salah satu provinsi yang ikut menjadi korban dalam sejarah kekerasan tersebut. Data penelitian yang mencatat suara-suara korban-penyintas trauma 65' di NTT dibukukan dengan judul *Memori-memori Terlarang* (2012) oleh Mery Kolimon dan tim. Melalui buku tersebut dapat dipahami bahwa narasi sejarah kekerasan 65' yang diterima secara umum, bukanlah narasi yang berpihak pada korban, tetapi justru melegitimasi tindakan kekerasan tersebut. Kekerasan dan pengabaian terhadap suara korban-penyintas '65 bagi masyarakat NTT ini meninggalkan jejak traumatis yang hendak ditelisik lebih jauh dalam artikel ini.

---

<sup>9</sup> Dalam teologi trauma, korban-penyintas trauma cenderung sulit memahami dan menjelaskan situasinya sendiri, dan karena itu mampu merampas kemampuan menalar realitas dengan jernih. Teologi pembebasan memahami kemiskinan sebagai masalah politik-struktural dan dilegitimasi dengan pendidikan yang tidak membebaskan. Hal tersebut melahirkan kemiskinan yang disertai dengan kebisuan masyarakat kelas bawah.

<sup>10</sup>Koalisi Keadilan & Pengungkapan Kebenaran (KKPK), *Menemukan Kembali Indonesia*, I. (Jakarta Pusat: Koalisi untuk Keadilan KKPK dan Pengungkapan kebenaran (KKPK), 2014), 62. Penelitian lain yang membenarkan hal ini: Werdinggar, *Tragedi 1965 di Indonesia Perspektif Kambing Hitam Rene Girard*, 39.

Perspektif teologi trauma menekankan sebuah kondisi psikis, spiritual, dan kesadaran sosial yang terganggu. Teologi trauma oleh Shelly Rambo dalam bukunya *Spirit and Trauma*, mengusung tema ‘teologi sisa’ “*remains*” dengan mengatakan bahwa *trauma is the suffering that does not go away. The study of trauma is the study of what remains*.<sup>11</sup> Kondisi ini menunjukkan ada memori yang belum bahkan tidak mudah untuk hilang setelah melewati peristiwa traumatis.

### *Sejarah Trauma Membentuk Identitas Kolektif*

Peristiwa traumatis dari penderitaan individu dalam masyarakat komunal seperti kekerasan massal, bencana, dan genosida memengaruhi perubahan tatanan sosial dan politik. Adam B. Lerner dalam bukunya *From the Ashes of History* menunjukkan trauma kolektif sebagai *potent political phenomenon*.<sup>12</sup> Bagi Lerner, memahami trauma kolektif membantu melihat bagaimana kepentingan negara tetap konstan. Pemahaman kritis atasnya dapat menjelaskan bahwa ketidakadilan dan ketidaksetaraan ikut membentuk imajinasi kontemporer “*to better account for how lingering injustices inequalities continue to shape contemporary imaginaries*.”<sup>13</sup> Dengan demikian, menjadi jelas bahwa trauma sosial dapat membentuk identitas kolektif dan ikut mempengaruhi tatanan sosial-politik.

Identitas kolektif yang dipengaruhi oleh sejarah traumatis merupakan gagasan Jeffrey Alexander dalam bukunya *Cultural Trauma and Collective Identity*. Bagi Alexander, identitas kolektif melibatkan referensi budaya “*identity involves a cultural reference*.” Selanjutnya, bahwa proses budaya dipengaruhi oleh struktur kekuasaan “*cultural process is deeply affected by power structures*.”<sup>14</sup> Berdasarkan pemikiran Alexander, dapat dipahami lebih lanjut bahwa identitas

---

<sup>11</sup> Shelly Rambo, *Spirit and Trauma: A Theology of Remaining* (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox, 2010), 15. Trauma yang tersisa dalam gagasan Rambo ini sebagai landasan berpikirnya terkait tawaran pemulihan. Karena trauma “tertinggal” setelah peristiwa guncangan, maka pemulihan menjadi sebuah ketidakpastian.

<sup>12</sup> Adam B Lerner, *From the Ashes of History: Collective Trauma and the Making of International Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2022), 27.

<sup>13</sup> Lerner, *From the Ashes of History: Collective Trauma and the Making of International Politics*. Kutipan ini memperlihatkan argumen Lerner terkait pemahaman trauma kolektif yang memperjelas konstannya kepentingan negara. Yang dimaksud dengan kepentingan negara yang tetap konstan adalah bahwa trauma kolektif muncul lintas generasi dan berinteraksi dengan kekuatan dinamika politik. Jika diterjemahkan pada konteks NTT, maka terbentuknya identitas masyarakat yang bungkam dapat melanggengkan *status quo*. Praktik melanggengkan kepentingan segelintir orang inilah yang akan dikritik dalam artikel ini, terutama dengan memakai pemikiran seorang tokoh pendidikan humanis-transformatif, Paulo Freire.

<sup>14</sup> Jeffrey C. Alexander, *Cultural Trauma and Collective Identity* (London: University of California Press, 2012), 10.

masyarakat NTT secara kolektif terbentuk dengan melibatkan unsur-unsur sosial. Unsur sosial yang dimaksud ialah termasuk peristiwa sejarah 65' yang meninggalkan jejak trauma terhadap kekuasaan.<sup>15</sup> Trauma politik ini kemudian membudaya dan terpola gaya hidup yang diam terhadap ketidakadilan, dan menjadi salah satu akar kebungkaman masyarakat NTT. Gaya hidup bungkam yang telah membudaya ini kemudian ikut mempengaruhi tatanan politik yang timpang. Dengan demikian, dapat dipahami bagaimana trauma politik masa lalu mempengaruhi ketidakmampuan masyarakat untuk mengklaim suara mereka di ruang publik, dan lebih buruknya membiarkan ketidakadilan sosial tetap langgeng. Inilah yang dimaksud dengan sejarah trauma yang membentuk identitas kolektif masyarakat.

Catatan penting dari Kolimon dan tim turut memperlihatkan bagaimana trauma dapat membentuk identitas secara kolektif. Mereka mencatat “bahasa sehari-hari di Kupang yang bersifat intimidasi melawan pengungkapan kebenaran; *loe diam, loe aman*.<sup>16</sup> Ungkapan ini lahir setelah peristiwa 65' yang mengisyaratkan diam di tengah keadilan akan mendatangkan kedamaian daripada bersuara kritis dan dianggap melawan. Bahasa ini kemudian dianggap sebagai lelucon sehari-hari, tetapi mengandung larangan secara implisit. Ungkapan tersebut kemudian mempengaruhi masyarakat yang meskipun sadar terhadap adanya ketidakadilan, tetapi tidak mampu menyuarakan kesadaran tersebut.

Peter Felix Kellermann dalam bukunya *Sociodrama and Trauma Collective* menjelaskan lebih jauh mengenai bagaimana tertinggalnya trauma dan mengganggu pada waktu tertentu. Berikut Kellermann membedakan enam fase munculnya respons trauma kolektif:

1. *Onset of the actual event (the shock phase);*
2. *The time immediately after the event (the reactive phase);*
3. *A few weeks or months after the event (the coping phase);*
4. *Many months, or years, after the events (the longterm effect);*
5. *Generations after the events (the transgenerational transmission of*

---

<sup>15</sup> Unsur sosial sebagai pembentuk identitas kolektif masyarakat NTT, tidak hanya terkait trauma politik 65'. Kualitas pendidikan yang tidak berbasis pada realitas sosial, keterbatasan akses, fasilitas, dan sarana-prasarana, jarak dari rumah ke sekolah, serta lingkungan hidup di mana masyarakat tinggal, adalah faktor penyumbang terbatasnya daya kritis dan kapabilitas masyarakat. Faktor-faktor utama yang terabaikan ini membentuk kualitas identitas kolektif masyarakat NTT yang semakin dibungkam atas ketidakadilan.

<sup>16</sup> Mery Kolimon; dkk, *Memori-memori Terlarang: Perempuan Korban & Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur* (Kupang: Yayasan Bonet Pinguwir, 2012), 373. (*loe* = kamu. Ungkapan kalimat ini biasanya dipakai jika ada sebuah polemik terkait politik atau kebijakan publik yang hendak dikritik).

*trauma*); 6. Centuries after the event (the universal influence of trauma on the history of humankind).<sup>17</sup>

Tahapan respons tersebut dijelaskan oleh Kellermann bahwa trauma dimulai sejak permulaan peristiwa traumatis (fase guncangan). Trauma kemudian teridentifikasi dari waktu bertahun-tahun lamanya, bahkan sampai lintas generasi, dan sampai berabad-abad lamanya. Tahapan respons menurut Kellermann menjelaskan secara jelas bagaimana trauma ikut membentuk identitas masyarakat lintas generasi.

Trauma yang tertinggal sekian lama tersebut kemudian mempengaruhi pola hidup masyarakat secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi jiwa setelah trauma tidak pulih begitu saja. Trauma kolektif tetap tertinggal dan mempengaruhi identitas masyarakat secara dinamis lintas generasi dan lintas historis. Terkait hal ini, Clara Mucci juga menjelaskan apa yang melampaui trauma individual dan trauma kolektif. Mucci memperlihatkan trauma sekunder “*secondary trauma*” untuk membuktikan bahwa trauma dapat bertransmisi lintas generasi “*inter-generational transmission of type of post-traumatic stress*.”<sup>18</sup> Gagasan Mucci ini dapat membantu mendudukkan akar masalah yang ikut mempengaruhi identitas kolektif masyarakat lintas generasi yang bungkam terhadap ketidakadilan.

Trauma kolektif kemudian mempengaruhi korban-penyintas merespons gejala sosialnya, bahkan mampu menghentikan nalar publik yang sehat. Dengan demikian, kapabilitas nalar dan mental untuk membaca realitas sosial menjadi terganggu. Jejak trauma masa lalu yang menjadi kenyataan hidup masyarakat, realitas kemiskinan, dan kualitas pendidikan yang kurang memadai turut menormalisasi kebungkaman masyarakat NTT. Pada akhirnya, masyarakat terbiasa diam terhadap berbagai masalah ketidakadilan sosial yang bahkan mengorbankan mereka.

### *Pemulihan dalam Teologi Trauma*

Teologi trauma memberi penekanan pada kesaksian gereja di tengah penderitaan manusia. Penderitaan yang dimaksudkan adalah kehidupan yang menjadi tidak normal lagi setelah melewati masa guncangan trauma. Jan S.

---

<sup>17</sup>Peter Felix Kellermann, *Sociodrama and Trauma Collective*, vol. 4 (London: Jessica Kingsley Publisher, 2007), 44.

<sup>18</sup>Clara Mucci, *Beyond Individual and Collective Trauma: Intergenerational Transmission, Psychoanalytic Treatment, and the Dynamics of Forgiveness* (London: Karnac Books, 2013), 136. Dalam buku ini, Mucci juga menjelaskan bagaimana trauma sekunder dipengaruhi oleh budaya hidup dan pembiasaan sejak masa kecil (hal. 174).

Aritonang turut memberi perhatian pada trauma sosial dan memperlihatkan bahwa teologi trauma secara langsung menawarkan pemulihan. Aritonang mengatakan:

Gereja, dalam hal ini anggota-anggotanya, dapat membantu menarasikan trauma sosial yang dialami masyarakat yang terluka karena konflik komunal dan politik. Teologi Trauma menawarkan suatu upaya langsung ke arah pemulihan, karena begitu beratnya kehancuran yang dialami penderitanya, sehingga eksistensi dirinya dalam hubungan dengan Tuhan senantiasa dipertanyakan.<sup>19</sup>

Meskipun teologi trauma menggugat peran gereja dalam upaya pemulihan, tetapi dapat disadari bahwa pemulihan merupakan sebuah “ketidakpastian.” Meskipun tidak pasti dalam kajian teologi trauma, tetapi pendekatan gereja dengan hadir dan mendengar tuturan korban-penyintas merupakan kunci dimulainya pemulihan.

Untuk memahami mengapa pemulihan menjadi tidak pasti dalam teologi trauma, dapat dilihat gagasan Rambo: “*the temporality of trauma and the reality of its return make it difficult to conceive of recovery in linear terms, as something to get over of get beyond.*”<sup>20</sup> Melalui gagasan Rambo, dapat disadari mengenai baliknya trauma yang mengganggu setelah peristiwa traumatis, bahkan lintas generasi. Hal ini berarti, untuk pulih dari trauma politik kekuasaan di NTT yang bersejarah membutuhkan ruang tahapan progresif.

Dalam pemaknaan Cathy Caruth, trauma adalah kisah tentang luka yang menjerit dalam bahasa, yang bahkan kebenarannya belum tersedia: “*the story of a wound that cries out, that addresses us in the attempt to tell us of a reality or truth that is not otherwise available.*”<sup>21</sup> Memahami luka dalam pemaknaan Caruth, berarti trauma membutuhkan pemulihan. Yang menjadi tantangannya adalah kebenaran tentang luka tersebut tidak menyediakan bahasa untuk dideteksi.

“Luka” yang tertinggal menjadi jejak trauma berkepanjangan. Dalam situasi ini, berarti teologi trauma merespons bahasa trauma yang tertinggal dalam diri korban, tetapi hilang-muncul pada saat tertentu dan tidak mudah dideteksi.<sup>22</sup> Hal ini

<sup>19</sup>Jan S Aritonang, *Teologi-Teologi Kontemporer* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 365.

<sup>20</sup>Rambo, *Spirit and Trauma: A Theology of Remaining*. Meskipun Rambo memberi perhatian pada trauma individual, tetapi masyarakat merupakan individu-individu komunal. Dengan demikian, trauma individual teridentifikasi secara kolektif dalam membicarakan tatanan sosial masyarakat.

<sup>21</sup>Cathy Caruth, *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History* (London: The John Hopkins University Press, 1996), 4.

<sup>22</sup>Yang dimaksud dengan “hilang-muncul” adalah efek trauma tersebut tertinggal dalam diri korban-penyintas, tetapi ia tidak serta-merta merusak seluruh aktivitas mereka. Trauma tersebut muncul dan mengganggu pada saat-saat tertentu, terutama ketika peristiwa yang sama terjadi kembali. Dalam pandangan trauma, hal inilah yang menyebabkan orang tidak berani tampil dan

menyebabkan orang yang sedang mengalami trauma bahkan tidak menyadari traumanya sendiri. Hal ini juga yang dikatakan oleh Septemmy Lakawa dalam bukunya *Kemurahhatian dan Trauma* bahwa seseorang yang mengalami trauma biasanya tidak secara langsung dapat menunjuk muasal dari trauma tersebut.<sup>23</sup> Akibat dari trauma dapat mempengaruhi kemampuan orang merespons realitas, tetapi tidak mudah disadari tanpa kesadaran kritis.

Judith Herman menjelaskan dalam bukunya *Trauma and Recovery* bahwa proses pemulihan trauma biasanya berkepanjangan karena menyerang psikologi “*psychological harm and the acceptance of prolonged recovery process.*”<sup>24</sup> Tingkat keparahan sebuah peristiwa ikut mempengaruhi dampak psikologisnya. Akibatnya dapat diukur dari jumlah orang yang terdampak atau intensitas dan durasi kerusakan “*the number of people affected or the intensity and duration of harm.*”<sup>25</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemulihan trauma politik secara kolektif tidak dapat diprediksi.

Jika trauma adalah luka menurut Caruth dan proses pemulihannya panjang menurut Herman, bahkan tidak pasti menurut Rambo, maka analisis pemulihan dalam teologi trauma memerlukan sumbangan paradigma baru. Pandangan mereka memiliki landasan berpikir bahwa trauma sangat mengganggu kesadaran manusia sehingga sulit berpulih. Meskipun demikian, trauma politik pada konteks NTT perlu dianalisis secara kompleks dan komprehensif. Jejak trauma akibat kekerasan 65’ yang melahirkan kebangkaman tidak dapat dilepaskan dengan analisis struktural terkait pembangunan manusia untuk dapat menghentikan kebangkaman. Teologi trauma yang menggugat kesaksian gereja, memerlukan sumbangan analisis interdisipliner yang lebih bersifat radikal untuk membongkar kebenaran tersebut. Artikel ini memakai sumbangan paradigma teologi pembebasan untuk menyoroti masalah “kebangkaman” di NTT, dan memastikan pemulihan secara struktural.

### ***Teologi Pembebasan Merespons Kebangkaman***

Jejak trauma yang mengakibatkan kebangkaman semakin terbentuk dengan ketimpangan regulasi dalam kebijakan politik yang mengalienasi kelas tertentu.

---

bersuara di ruang publik karena mereka pernah mengalami kekerasan akibat bersuara dan mengkritik.

<sup>23</sup> Septemmy E. Lakawa, *Kemurahhatian Dan Trauma: Imajinasi Baru Misi Kristiani* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), xxix.

<sup>24</sup> Judith Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror* (New York: Basic Book, 1993), capt. 3.

<sup>25</sup> Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror*.

Kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan di NTT<sup>26</sup> dan pengabaian terhadap pembangunan manusia membatasi pertumbuhan daya kritis. Membaca fakta kebungkaman dalam paradigma teologi pembebasan dapat menawarkan solidaritas dan pendidikan kritis sebagai upaya pembebasan transformatif. Catatan pentingnya adalah; miskin dan terluka (trauma) oleh masyarakat NTT menjadi catatan evaluasi bagi upaya pemberdayaan lebih lanjut.

Teologi pembebasan berpihak pada kelompok yang terabaikan dan tidak dianggap penting dalam sejarah. Tokoh terkemuka teologi pembebasan, Gustavo Gutierrez dalam bukunya; *Las Casas*, mengatakan bahwa “*God’s special concern for ‘insignificant of history,’ persons who are treated by others as if they were somehow inferior.*”<sup>27</sup> Gutierrez memaknai teologi pembebasan sebagai refleksi yang berpijak dari kaum miskin dan tertindas, karena mereka adalah orang-orang yang hak-haknya paling terabaikan dalam sejarah. Baginya, pertobatan Kristiani menyiratkan pertobatan terhadap sesama. Sesama yang dimaksud adalah “*the oppressed person, the exploited social class, the despised ethnic group, the dominated country.*”<sup>28</sup> Oleh karena itu, pengembangan teologi pembebasan selalu berpihak pada kelompok korban dari tatanan sosial-politik yang timpang.

Membicarakan keberpihakan pada kaum miskin dan tertindas, teologi pembebasan bersifat mengkritik struktur. Ketimpangan struktur sosial terisolir dalam sistem yang menindas. Kelompok yang dikorbankan oleh tatanan tidak mampu membebaskan dirinya sendiri jika pembangunan tidak berpihak pada mereka. Kapabilitas menalar realitas dibatasi oleh pendidikan yang tidak membebaskan. Dengan demikian, teologi pembebasan memuncak pada tawaran: solidaritas, dan perhatiannya pada pendidikan kritis sebagai upaya penyadaran.

### *Solidaritas dan Pendidikan Kritis*

*Pertama, solidaritas.* Mayoritas masyarakat NTT beragama Kristen, sekaligus berada pada urutan ketiga provinsi di bawah garis kemiskinan, bahkan cenderung diam terhadap ketidakadilan. Hal ini sangat penting menjadi bahan evaluasi berbagai institusi dan organisasi Kristen yang ada di NTT. Solidaritas bersama masyarakat miskin dan trauma yang dimaksud dalam tulisan ini akan lebih

---

<sup>26</sup> Elisabeth Palmi Bheni and Adi Joko Purwanto, “Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016-2017,” *Kajian Hubungan Internasional* 1, no. 1 (October 2022): 128.

<sup>27</sup> Gustavo Gutierrez, *LAS CASAS: In Search of The Poor of Jesus Christ*, ed. Robert R. Barr (New York: Orbis Books, 1995), 217.

<sup>28</sup> Gustavo Gutierrez, *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation* (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1973), 118.

mendarat pada konteks NTT jika dipahami dalam tujuan pembebasan secara struktural. Perlu disadari bahwa kehadiran gereja di tengah realitas NTT masih sarat dengan isu keterbelakangan, ketimpangan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Pengabaian negara terhadap pembangunan manusia menantang gereja untuk bertindak melampaui sejarah pembungkaman dan ikut terlibat memaksimalkan kapabilitas kritis jemaat dan masyarakat secara luas.

Solidaritas dimaknai dalam teologi pembebasan sebagai bahasa kesaksian humanis di tengah realitas dehumanisasi. Bagi Gutierrez, tidak ada keberpihakan yang konkret jika belum sampai pada tindakan solidaritas bersama kaum miskin dan protes terhadap kemiskinan “*solidarity with the poor and a protest against poverty*.”<sup>29</sup> Intensi poin ini penting untuk menggugat peran gereja dalam bersaksi di tengah realitas yang membungkam masyarakat NTT. Dalam hal ini, solidaritas berarti kehadiran progresif bersama masyarakat yang terluka, yang tinggal dalam kebungkaman terhadap ketidakadilan, sekaligus sebagai kaum miskin yang tertindas.

Bagi Gutierrez, tindakan terbaik gereja dalam menghadapi ketertindasan adalah hadir bersama kaum tertindas dalam relasi solidaritas. Solidaritas berarti tanpa relasi kuasa, di mana gereja hadir bukan untuk mewakili, tetapi mendengar dan memediasi suara mereka. Solidaritas membentuk pola pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, kontekstual, dan integral. Gereja perlu mendampingi sekaligus memfasilitasi protes dari bawah untuk memastikan akses regulasi kekuasaan berpihak secara nyata bagi mereka yang dibungkam dan diabaikan.

*Kedua, pendidikan kritis.* Teolog Indonesia yang dipengaruhi oleh pemikiran Gutierrez, William Chang turut memberi pemahaman mengenai apa itu pendidikan yang sebenarnya. Chang memaknai pendidikan sebagai praktik kebebasan dan pembebasan yang tergantung pada keputusan politik untuk membentuk manusia hidup secara penuh dalam keadaan konkret.<sup>30</sup> Gutierrez juga merujuk pada pendidikan kritis menuju praksis “*conscientization*.”<sup>31</sup> Ia merujuk pada analisis dan argumen Paulo Freire yang mengusung ide “pendidikan kritis” sebagai alat perlawanan penindasan struktural yang membuat orang bungkam terhadap ketidakadilan.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pendidikan yang tidak bersifat menyadarkan berarti secara sengaja mempertahankan politik *status quo*. Freire

---

<sup>29</sup>Gutierrez, *A Theology of Liberation; History, Politics, and Salvation*.

<sup>30</sup>William Chang, *Berteologi Pembebasan* (Jakarta: OBOR, 2004), 61.

<sup>31</sup>Gutierrez, *A Theology of Liberation; History, Politics, and Salvation*. Pada poin ini, Gutierrez merujuk pada Ide Freire tentang “kesadaran kritis”.

menggunakan istilah *humanization*<sup>32</sup> yang merujuk pada pendidikan kritis sebagai bentuk humanisasi melawan dehumanisasi struktural. Dalam karya yang lain mengenai ide Freire; *Pendidikan yang Membebaskan*, mengatakan bahwa “masyarakat bisu” dimaknai sebagai matinya pengalaman demokrasi.<sup>33</sup> Freire menyebut ketidakberdayaan kaum miskin adalah sebagai “*the culture of silence.*” Berikut Freire memperlihatkan bahwa kebisuan masyarakat rentan adalah akibat langsung dari sistem dominasi.

*Their ignorance and lethargy were the direct product of the whole situation of economic, social, and political domination and of the paternalism of which they were victims. Rather than being encouraged and equipped to know and respond to the concrete realities of their world, they were kept “submerged” in a situation in which such critical awareness and response were practically impossible.*<sup>34</sup>

Freire kemudian mengusung “kesadaran kritis” sebagai alat perlawanan “budaya bisu.”<sup>35</sup> Dalam perspektif pendidikan kritis, tentu peran regulasi kekuasaan ditekankan sebagai yang berpotensi memungkinkan keadilan sosial, tetapi juga sekaligus yang berpotensi menindas masyarakat.

Pemulihan trauma yang dimaksud dalam poin pendidikan kritis ini adalah menuju sebuah kondisi penuh kesadaran kritis atas potensi diri dari masyarakat. Kesadaran inilah yang mampu membebaskan mereka dari kebungkaman untuk berkembang sesuai tujuannya masing-masing sebagai manusia bermartabat. Hal ini tepat seperti yang diuraikan Gutierrez “*to help them become aware of their own mission by cooperating in their liberation and development.*”<sup>36</sup> Hal ini karena trauma terhadap kekuasaan represif dapat merampas kebebasan masyarakat untuk mengklaim suara mereka sendiri untuk tampil di ruang publik.

### *Pemulihan dalam Teologi Pembebasan*

Teologi trauma memahami “pemulihan” sebagai sesuatu yang tidak pasti” dan sulit dideteksi. Meskipun demikian, pada konteks kemiskinan dan kebungkaman, membutuhkan sebuah respons transformatif yang konkret. Teologi pembebasan menawarkan solidaritas dan pendidikan kritis sebagai jalan

---

<sup>32</sup>Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, ed. Myra Bergman Ramos (London: Continuum, 2000), 44.

<sup>33</sup> Paulo Freire, *Pendidikan Yang Membebaskan*, ed. Mujib Hermani (Jakarta Timur: MELIBAS, 2001), 27.

<sup>34</sup>Freire, *Pedagogy of the Oppressed*.

<sup>35</sup>Ibid.

<sup>36</sup>Gutierrez, *A Theology of Liberation; History, Politics, and Salvation*.

pembebasan dari penindasan. Teologi pembebasan secara tegas mengkritik struktur sosial yang menindas, dan karena itu mesti dilakukan tindakan perlawanan.

Solidaritas dan pendidikan kritis dalam konsep dialogis merupakan tawaran paling rasional dalam menghadapi situasi kemiskinan dan kebungkaman. Meskipun demikian, pada konteks NTT yang teridentifikasi dengan sejarah trauma politik 65', upaya pemulihan menjadi kompleks dan tidak mudah. Menyadari bahwa trauma turut membentuk pola hidup kolektif yang diam terhadap ketidakadilan, maka penerapan kedua tawaran ini memerlukan ruang adaptasi transformatif bagi masyarakat. Hal ini karena, korban-penyintas trauma tidak mudah keluar dari pengalaman traumanya. Berdialog secara solider dan kritis dapat memungkinkan suara mereka yang diredam dan dibungkam mampu keluar secara perlahan dan membentuk daya kritis, serta keberanian.

Menurut Freire, dialog adalah ekspresi cinta terhadap sesama tanpa relasi dominasi: *“love is at the same time the foundation of dialogue and dialogue itself. It is thus necessarily the task of responsible Subject and cannot exist in a relation of domination.”*<sup>37</sup> Dengan berdialog secara kritis dalam mempersoalkan tatanan dapat mematahkan kebungkaman yang mengalienasi masyarakat kelas bawah. Secara lebih progresif, bagi Freire, dialog menjadi sarana kemitraan menamai dunia *“closer partnership in the naming of the world.”*<sup>38</sup> Hal ini berarti, pelaku dialog dalam relasi yang setara dapat menyadari posisi sosialnya masing-masing dan mampu memberi respons kritis terhadap realitas yang menindas.

Solidaritas dalam teologi pembebasan menawarkan pendekatan yang tidak hanya tinggal bersama masyarakat, tetapi hadir untuk berdialog. Di dalam dialog, tercipta suasana bertutur dan mendengar.<sup>39</sup> Bagi Gutierrez, mitra dialog dalam teologi pembebasan adalah orang miskin dan mereka yang hak-hak serta “kemanusiaannya” diabaikan. Gutierrez mengatakan:

*In the development of liberation theology our awareness of this new presence has made us aware that our partners in dialogue are the poor, those who are “nonpersons”-that is, those who are not considered to be human beings with full rights, beginning with the right to life and to freedom in various spheres.*<sup>40</sup>

Dialog dalam pandangan teologi pembebasan merupakan tanggung jawab gereja. Cara gereja untuk hadir di tengah jemaat dan masyarakat secara luas akan

---

<sup>37</sup>Freire, *Pedagogy of the Oppressed*.

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup> Mendengar tuturan cerita sangat penting ditekankan dalam teologi trauma sebagai langkah pertama menuju pemulihan.

<sup>40</sup>Gutierrez, *A Theology of Liberation; History, Politics, and Salvation*.

sangat menentukan keberpihakan dan posisinya. Bahkan bagi Gutierrez, gereja tidak hanya berdialog dalam solidaritas, tetapi mesti sampai pada tindakan protes terhadap ketidakadilan dan tatanan yang menindas. Dengan demikian, tawaran pemulihan dalam teologi pembebasan adalah dialog kritis. Dialog kritis adalah langkah pertama menuju transformasi masyarakat yang miskin dan bungkam.

### ***Peran Konkret Gereja dan Negara***

Sepanjang sejarah perkembangan peradaban manusia, tidak terlepas dari peran politik dan agama. Kedua elemen ini berpengaruh dan turut membentuk realitas sosial. Keduanya memiliki dua wajah sekaligus; sebagai yang berpotensi menciptakan keadilan, sekaligus juga berpotensi menindas atau melegitimasi penindasan. Artikel ini hendak mengkonsepkan di titik mana gereja dan negara dapat berperan bagi transformasi peradaban yang berwajah adil dan bebas.

### ***Gereja***

Kolimon dan tim dalam buku *Menolak Diam*, mengungkap bahwa kerentanan ekonomi membuat masyarakat NTT mudah terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia. Bagi mereka, kehadiran gereja tidak lagi hanya membuka kebungkaman dan mendampingi korban, tetapi juga penting dilakukan upaya pemberdayaan ekonomi.<sup>41</sup> Penelitian ini menunjukkan penolakan terhadap kebisuan yang terjadi di tengah masyarakat NTT. Hal ini ditegaskan mereka karena kehidupan masyarakat kelas bawah terancam perbudakan, tetapi tidak ada perlawanan dari mereka sendiri. Suara-suara perlawanan terjadi pada lingkup penelitian akademis, tetapi kurang mempertegas kritik yang turut membangun gerakan perlawanan kelas bawah.<sup>42</sup> Para akademisi perlu mempengaruhi gerakan dari kelas bawah untuk tampil secara lantang dan menggugat keadilan, serta hak-hak mereka di ruang publik.

Kolimon dan tim mencatat hal-hal yang dapat dikerjakan oleh lembaga Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) atas masalah kebangsaan. PGI dapat berperan sebagai: 1. Pengawal terlaksananya pengelolaan negara, 2. Penyuar kegelisahan masyarakat atas apa yang sedang dan akan terjadi, 3. Penyumbang gagasan inovatif mengatasi persoalan yang dihadapi bangsa, 4. Komunikator yang

---

<sup>41</sup> Meri Kolimon et al., *MENOLAK DIAM: Gereja Melawan Perdagangan Orang* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 22.

<sup>42</sup>Perlawanan yang dimaksud tentu perlawanan tanpa kekerasan, tetapi menjamin perubahan tatanan.

merepresentasikan komunitas Kristen berhadapan dengan umat lain.<sup>43</sup> Catatan ini penting sebagai bentuk tanggung jawab etis yang diperankan oleh lembaga gereja sebagai penyuaara Kabar Baik.

Menurut Kolimon, trauma merampok rasa berdaya korban.<sup>44</sup> Perampokan rasa berdaya ini membuat mereka menjadi tidak berdaya kritis ketika berhadapan dengan realitas ketidakadilan. Hal ini menjadi penting untuk gereja yang bersaksi dan negara yang memfasilitasi masyarakat untuk berproses keluar dari pola hidup yang terbiasa diam terhadap ketidakadilan. Dalam hal ini, tentu gereja memerlukan strategi panjang untuk memastikan keterlibatan pemerintah secara progresif dalam upaya pembebasan masyarakat miskin dan bungkam. Dimulai dari kerja sama hal-hal yang sederhana dan kemudian gereja ikut mempengaruhi perhatian dan keberpihakan pemerintah sebagai regulator utama. Dengan demikian, institusi gereja lokal di NTT ikut terlibat aktif menggerakkan institusi lain dalam perjuangan pembebasan bagi mereka yang paling membutuhkan keberpihakan akses.

### *Negara*

Berdasarkan poin sebelumnya mengenai sejarah kekerasan 65' yang dilancarkan dengan dukungan militer, maka dapat dikatakan bahwa negara turut mengambil andil sebagai pelaku trauma masa lalu. Peristiwa tersebut dapat disebut sebagai "genosida" karena pembunuhan besar-besaran yang dilakukan. Menurut Indra Anugrah dan tim, bahwa berdasarkan fakta, maka tindakan kekerasan 65' memenuhi konvensi genosida.<sup>45</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi bahan evaluasi dalam setiap penelitian akademis terkait sejarah traumatis tersebut. Perhatian utama diberikan kepada pihak korban yang belum mendapat keadilan politis sampai saat ini. Kolimon menegaskan tuntutan tanggung jawab atas pelanggaran HAM<sup>46</sup> berat yang dilakukan secara langsung atau atas perintah para penguasa sebagai upaya pemulihan sosial terkait trauma 65' bagi masyarakat NTT.<sup>47</sup> "Tanggung jawab negara" yang dimaksudkan dalam artikel ini melampaui sebuah pengakuan. Artikel ini menegaskan bahwa masyarakat yang miskin dan terbungkam membutuhkan

---

<sup>43</sup>Kolimon et al., *MENOLAK DIAM: Gereja Melawan Perdagangan Orang*.

<sup>44</sup>Mery; dkk Kolimon, *Memori-Memori Terlarang: Perempuan Korban & Penyintas Tragedi '65 Di Nusa Tenggara Timur* (Kupang: Yayasan Bonet Pinggupir, 2012), 364.

<sup>45</sup>Indra Anugrah, M Ali B Siti, and Aisyah M Chaerul, "Telaah Putusan International People's Tribunal Pelanggaran Ham 1965," *Siyasatuna* 4, no. 1 (2023): 59.

<sup>46</sup>Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan ini disebut pelanggaran HAM berat karena mengorbankan 5000-1.000.000 jiwa di Indonesia (lihat catatan kaki ke-9).

<sup>47</sup>Kolimon, *Misi Pemberdayaan; Perspektif Teologi Feminis*.

kebijakan politik yang secara konkret berpihak pada mereka sebagai korban-penyintas.

Pada akhirnya, pemberdayaan masyarakat sipil bersentuhan langsung dengan akses kekuasaan. Proses penyadaran dan pendidikan kritis dalam gereja dan sekolah formal maupun non-formal dalam mengupayakan keadilan integral tetap membutuhkan peran regulasi pemerintah. Dengan demikian, upaya penyadaran melalui solidaritas dan pendidikan kritis sekaligus juga menantang gereja membangun relasi harmonis yang saling berkelindan dengan institusi pemerintah. Gereja menjadi fasilitator peningkatan mutu pendidikan kritis dan menciptakan ruang dialogis yang mampu menjembatani kesenjangan relasi antara pemerintah dan masyarakat sipil akibat bias sejarah trauma politik 65'. Di titik ini, relasi kerjasama institusi gereja dan institusi negara menjadi jelas demi upaya pemulihan dan pembebasan secara struktural dan turut membentuk tatanan sosial selanjutnya.

Kehadiran negara menjadi signifikan dalam masalah kemiskinan dan kebungkaman jika disertai dengan upaya kesetaraan hak masyarakat sipil. Franz Magnis-Suseno dalam bukunya *Etika Politik*, menyatakan bahwa mengupayakan keadilan sosial berarti mengubah, bahkan membongkar struktur-struktur ekonomi, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat.<sup>48</sup> Tanggung jawab negara sangat menentukan terciptanya keadilan sosial dalam menjamin hak bernegara bagi lapisan masyarakat paling bawah. Oleh karena itu, institusi gereja hadir untuk menjaga keseimbangan regulasi politik dan memastikan keadilan benar-benar menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Pada titik keseimbangan ini, relasi gereja dan negara mendesak diperlukan dalam mengupayakan keadilan sosial.

### ***Dialog Kritis sebagai Pemulihan Transformatif***

Jejak pembungkaman yang terdeteksi dari lensa trauma dan tawaran pemulihan dalam solidaritas dan pendidikan kritis, perlu melihat tahapan yang memungkinkan pemulihan tersebut menjadi nyata. Teologi trauma merujuk pada sensitivitas teologis dalam memaknai iman secara utuh untuk bersaksi di tengah penderitaan yang tersisa setelah peristiwa traumatis. Untuk melihat pentingnya tahapan adaptasi, dapat diperhatikan gagasan Lerner bahwa trauma mampu membawa orang ke dalam isolasi sosial "*psychic trauma in individuals can*

---

<sup>48</sup> Franz Magnis-Suseno, *ETIKA POLITIK: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), 426–427.

*suppress memory and language, leading to social isolation.*”<sup>49</sup> Hal ini membuat pemulihan semakin sulit dimungkinkan dan memerlukan tahapan panjang.

Judith Herman memperlihatkan bahwa trauma adalah hilangnya kemampuan manusia untuk beradaptasi akibat “*overwhelming events*”.<sup>50</sup> Adaptasi yang dimaksud oleh Herman adalah upaya korban-penyintas untuk menerima kenyataan pasca trauma dan melanjutkan hidup secara normal. Dengan demikian, trauma menyerap kemampuan beradaptasi sosial secara kolektif pada kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, adaptasi mendapat perhatian penting dalam artikel ini sebagai tahapan menuju kemampuan kritis korban-penyintas untuk memahami kebungkamannya sendiri dan bangkit dengan bersuara. Untuk tahapan adaptasi ini, teologi trauma memerlukan analisis struktural dari teologi pembebasan sebagai solusi transformatif yang menghadirkan dialog kritis.

Masalah kebungkaman di NTT ditelisik melalui perspektif teologi trauma agar lebih mengakar pada sejarah dan teologi pembebasan untuk mengkritik struktur. Melihat kebungkaman sebagai akibat dari trauma politik 65’ dan pendidikan yang tidak membebaskan, maka memerlukan upaya pemulihan dan pembebasan. Pemulihan trauma dan pembebasan struktural membutuhkan ruang adaptasi dalam prinsip dialog kritis. Memahami trauma sebagai sesuatu yang tertinggal dan mengganggu masa depan, maka catatan optimis oleh Freire menjadi penting untuk dimaknai:

*The dehumanization resulting from an unjust order is not a cause for despair but for hope, leading to the incessant pursuit of the humanity denied by injustice. Hope, however, does not consist in crossing one’s arms and waiting. As long as I fight, I am moved by hope; and if I fight with hope, then I can wait.*”<sup>51</sup>

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa orang yang tinggal dalam trauma politik dan kondisi tatanan sosial yang menindas akan sulit melihat harapan dan tujuan hidup. Pengabaian terhadap pembangunan manusia semakin memperburuk kehidupan tanpa harapan tersebut. Dengan demikian, maka

---

<sup>49</sup>Lerner, *From the Ashes of History: Collective Trauma and the Making of International Politics*.

<sup>50</sup>Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror*. Dengan memahami korban-penyintas trauma yang terisolasi dari realitas sosial menurut Lerner, dapat semakin memperjelas pentingnya tahapan adaptasi. Istilah adaptasi oleh Herman, dikembangkan dalam artikel ini menjadi adaptasi-transformatif. Terminologi transformatif merupakan pengembangan dari gagasan teologi pembebasan. Transformasi penting untuk disandingkan dengan pemaknaan adaptasi agar lebih berjiwa progresif dan emansipatif.

<sup>51</sup>Freire, *Pedagogy of the Oppressed*. Disini dapat secara jelas dipahami bahwa akses kekuasaan adalah penentu utama bagi perjuangan hidup masyarakat. Mereka yang terabaikan oleh akses tentu tertinggal secara kualitas dan kapabilitas diri.

menanggapi trauma politik lintas generasi yang dilegitimasi oleh tatanan yang menindas, memerlukan gerakan optimis dalam perjuangan pembebasan. Perjuangan pembebasan ini mesti berbasis pada pembangunan manusia, dan karena itu memerlukan waktu dan strategi yang bersifat progresif.

Freire menegaskan bahwa berdialog di tengah masyarakat mesti didasarkan pada cinta terhadap dunia, kehidupan dan manusia. *“If I do not love the world, if I do not love life, if I do not love people, I cannot enter to the dialogue.”*<sup>52</sup> Hal ini karena, di dalam dialog, tercipta relasi yang setara dan memandang yang lain sebagai subjek pembebasan dan bukan objek. Hal inilah yang membawa pelaku pembebasan dapat secara sadar menciptakan relasi yang solider tanpa mengobjekkan manusia lain. Teologi pembebasan berupaya hadir dengan lensa baru melihat manusia sebagai subjek yang bermartabat dan memiliki potensi diri. Dengan demikian, teologi pembebasan menawarkan solidaritas dan pendidikan kritis dalam prinsip dialog transformatif yang berpijak dan bertujuan pada gerakan humanisasi.

Rambo mempertanyakan peran kesaksian teologi dalam melihat jejak trauma yang tersisa *“can theology witness to this suffering that does not go away, to the storm that is always here? if so, how?”*<sup>53</sup> Panggilan teologis menuntut kesaksian gereja dalam mengupayakan bentuk kehadiran yang nyata. Secara khusus, gereja perlu berpihak pada kelompok yang rentan terhadap perubahan dan dominasi kekuasaan. Berkaitan dengan hal ini, teologi pembebasan juga turut mempertanyakan, *“what is implied when we tell nonpersons that they are sons and daughters of God? . . . How are we to speak of God in face of the suffering of the innocent?”*<sup>54</sup> Kutipan ini menunjukkan bahwa penderitaan membuat manusia sulit melihat Allah secara utuh. Oleh karena itu, teologi perlu mendarat pada sebuah peran konkret gereja untuk mengupayakan keadilan di tengah masyarakat yang ditandai dengan penderitaan. Melalui upaya konkret tersebut, mereka mulai mampu memaknai Allah secara utuh melalui dirinya sendiri dan realitasnya. Dengan demikian, harapan hidup di masa depan dapat diperjuangkan. Disinilah titik pertemuan dari teologi trauma dan teologi pembebasan. Keduanya menekankan perhatian terhadap penderitaan *“suffering,”* dan sumbangan gagasan teologi pembebasan menjadikan penderitaan tersebut sebagai tantangan radikal.

---

<sup>52</sup>Ibid.

<sup>53</sup>Rambo, *Spirit and Trauma: A Theology of Remaining*.

<sup>54</sup>Gustavo Gutierrez, *The Truth Shall Make You Free* (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1990), 9.

Teologi pembebasan dan teologi trauma menolak tindakan pemulihan yang selesai hanya dengan teologi naratif, seperti yang dikritisi juga oleh Lakawa, “*everything will be fine! God is good!*”<sup>55</sup> Persoalan trauma politik, kemiskinan, dan penderitaan lainnya yang merenggut martabat dan kesejahteraan manusia memerlukan sebuah tanggapan teologis yang melampaui kata-kata penghiburan. Jika tanggapan atas trauma yang membungkam manusia memerlukan tindakan konkret, maka ruang dialog kritis dapat secara mendesak diperlukan untuk memungkinkan yang dibungkam menjadi bersuara.

Kesaksian gereja di tengah masyarakat miskin dan trauma yang dimaksud dalam tulisan ini akan lebih mendarat pada konteks NTT jika dipahami dalam tujuan pemulihan untuk pembebasan dari penderitaan. Pembebasan yang dimaksud adalah bebas dari struktur yang menindas dan hidup yang berpengharapan menuju tatanan sosial yang adil. Bagaimana harapan itu menjadi nyata? Hal yang paling mungkin adalah masuk dalam proses adaptasi transformatif di ruang dialog kritis. Penting diakui bahwa beragam pendekatan teori telah dilakukan oleh para peneliti akademisi maupun gerakan lapangan oleh para aktivis di NTT. Meskipun demikian, hal yang sering terlewatkan adalah berdialog dalam wacana sosial untuk memberi ruang bagi suara yang dibungkam dan memfasilitasi hak masyarakat yang terabaikan.

Dialog kritis membuka relasi yang setara antar pelaku dialog. Dengan memberi perhatian pada realitas sosial akan membuka percakapan secara dinamis-transformatif sebagai proses penyadaran tanpa dominasi. Hal ini diperlukan, karena jika relasi yang dibangun tanpa dialog kritis yang setara, maka yang terjadi adalah tindakan mendominasi. Tindakan mendominasi atau mewakili suara tanpa mendengar tuturan mereka terlebih dahulu berarti terjadi kembali penindasan dengan gaya yang berbeda. Perjuangan pembebasan adalah mempertimbangkan tatanan sosial yang menindas. Dengan demikian, wacana yang dibangun bersama masyarakat sebagai pelaku dialog kritis adalah membicarakan ketidakadilan. Ketika mereka mampu berdialog, kesadaran mereka akan muncul secara kritis untuk mampu memahami diri sendiri dan realitas sosialnya.

Seperti yang dikatakan Freire, bahwa orang baru bisa berharap terjadinya perubahan, jika perubahan itu diupayakan “*Hope, however, does not consist in crossing one’s arms and waiting. As long as I fight, I am moved by hope; and if I fight with hope, then I can wait*”.<sup>56</sup> Orang tidak dapat duduk diam dan menunggu,

---

<sup>55</sup>Lakawa, *Kemurahhatian Dan Trauma: Imajinasi Baru Misi Kristiani*.

<sup>56</sup>Freire, *Pedagogy of the Oppressed*.

tetapi pembebasan melibatkan perjuangan bersama. Dimulai dengan dialog kritis, para pejuang pembebasan percaya bahwa kekuatan wacana mampu menarik keluar suara yang terbungkam. Bahkan tidak hanya bersuara, tetapi suara mereka yang tertindas dapat didengar.<sup>57</sup> Jika orang tidak lagi terbungkam, ini menjadi langkah pertama untuk merubah tatanan menjadi lebih adil dan humanis. Masyarakat kemudian mampu menyuarakan hak mereka sendiri dan ikut mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, tawaran teologi trauma dan teologi pembebasan mengenai kesaksian konkret gereja di tengah penderitaan, dapat ikut menciptakan harapan bagi kelompok yang miskin, terbungkam dan yang menjadi korban ketimpangan tatanan sosial.

### Simpulan

Lensa trauma memperlihatkan keterlibatan teologi Kristen dalam memahami penderitaan sosial secara lebih utuh dan mengakar pada sejarah. Realitas kemanusiaan yang digerus oleh tatanan sosial yang timpang dan pembiasaan pola hidup yang diam terhadap ketidakadilan memerlukan sebuah kondisi bebas. Inilah alasan mengapa proses pemulihan transformatif menjadi sangat diperlukan, agar proses pembebasan dapat terealisasikan. Tawaran solidaritas dan pendidikan kritis yang dijalankan dalam konsep dialog kritis adalah tahapan pemulihan transformatif yang menjadi usulan penting dalam artikel ini. Artikel ini juga menawarkan penelitian selanjutnya yang secara langsung menggugat masalah kemiskinan dan pengabaian terhadap pembangunan manusia di NTT. Gugatan tersebut dapat secara langsung menuntut keadilan bagi hak-hak masyarakat sipil.

### Daftar Pustaka

- Alexander, Jeffrey C. *Cultural Trauma and Collective Identity*. London: University of California Press, 2012.
- Anugrah, Indra, M Ali B Siti, and Aisyah M Chaerul. "Telaah Putusan International People's Tribunal Pelanggaran Ham 1965." *Siyasatuna* 4, no. 1 (2023): 54–64.
- Aritonang, Jan S. *Teologi-Teologi Kontemporer*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.

---

<sup>57</sup>Poin ini penting karena suara masyarakat kelas bawah tidak hanya dibungkam, tetapi juga tidak didengar. Dengan suara mereka didengar, maka kebijakan publik secara terdesak dapat memberi keberpihakan akses pada mereka yang selama ini dibungkam dan diabaikan. Dalam hal ini, penting untuk dipertegas bahwa "akses adalah hak dasar masyarakat sipil" dak karena itu, hak tersebut harus dilindungi oleh negara dan dikembalikan kepada mereka.

- Bheni, Elisabeth Palmi, and Adi Joko Purwanto. "Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016-2017." *Kajian Hubungan Internasional* 1, no. 1 (October 2022): 123.
- Cahyono, Didik Christian Adi, and Agustina Raplina Samosir. "Trauma Dan Rekonsiliasi: Peran Gereja Bagi Perjuangan Pemulihan Penyintas Tragedi Kekerasan Di Indonesia." *Kurios* 9, no. 2 (2023): 478.
- Caruth, Cathy. *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*. London: The John Hopkins University Press, 1996.
- Chang, William. *Berteologi Pembebasan*. Jakarta: OBOR, 2004.
- Endah Marendah Ratnaningtyas. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini* (2023): 208.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. Edited by Myra Bergman Ramos. London: Continuum, 2000.
- . *Pendidikan Yang Membebaskan*. Edited by Mujib Hermani. Jakarta Timur: MELIBAS, 2001.
- Gutierrez, Gustavo. *A Theology of Liberation; History, Politics, and Salvation*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1973.
- . *LAS CASAS: In Search of The Poor of Jesus Christ*. Edited by Robert R. Barr. New York: Orbis Books, 1995.
- . *The Truth Shall Make You Free*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1990.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kualitatif." Medan: Wal Ahri Publishing, 2020.
- Herman, Judith. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Book, 1993.
- Kellermann, Peter Felix. *Sociodrama and Trauma Collective*. Vol. 4. London: Jessica Kingsley Publisher, 2007.
- Koalisi Keadilan & Pengungkapan Kebenaran (KKPK). *Menemukan Kembali Indonesia*. I. Jakarta Pusat: Koalisi untuk Keadilan KKPK dan Pengungkapan kebenaran (KKPK), 2014.
- Kolimon, Meri, Hans A. Harmakaputra, Toar B. Hutagalung, and Rappan Paledung. *MENOLAK DIAM: Gereja Melawan Perdagangan Orang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Kolimon, Mery; dkk. *Memori-Memori Terlarang: Perempuan Korban & Penyintas Tragedi '65 Di Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Yayasan Bonet Pinggupir, 2012.
- Kolimon, Mery. *Misi Pemberdayaan; Perspektif Teologi Feminis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.

- Lakawa, Septemmy E. *Kemurahhatian Dan Trauma: Imajinasi Baru Misi Kristiani*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- Lerner, Adam B. *From the Ashes of History: Collective Trauma and the Making of International Politics*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Magnis-Suseno, Franz. *ETIKA POLITIK: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Mucci, Clara. *Beyond Individual and Collective Trauma: Intergenerational Transmission, Psychoanalytic Treatment, and the Dynamics of Forgiveness*. London: Karnac Books, 2013.
- Rambo, Shelly. *Spirit and Trauma: A Theology of Remaining*. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox, 2010.
- Suryawan, I Ngurah. "Politik Kekerasan Dan Pembisuan." *KRITIS* 25, no. 1 (October 2016): 54–70.
- Tim Penulis Melki Beatrix Foundation. "Melawan Budaya Diam Menuju Pendidikan NTT Yang Dialogis: Kumpulan Opini Dan Puisi." Guepedia, 2020.
- Werdininggar, Silvia Pristi. "Tragedi 1965 Di Indonesia Perspektif Kambing Hitam Rene Girard." *Skripsi Universitas Sanata Dharma* (2015): 1–72.